

EVALUASI KEBIJAKAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DI KECAMATAN MOUTONG KABUPATEN PARIGI MOUTONG

Rukli

ruklichamser@gmail.com

Mahasiswa Program Studi Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Tadulako

Abstract

This study aims to find out the implementation of Social Conflict Handling in Moutong Sub-district of Parigi Moutong Regency through Qualitative Descriptive Approach based on model of Logical Framework Approach (LFA) Evaluation Approach According to WK Kellogg Foundation, with 5 (five) analysis tools such as Input, Activities, Output, Outcome, and Impact, the number of informants as many as 8 (eight) people, determined by informants who know the problems studied. Data collection is done by observation, interview, and documentation. Based on the results of research and discussion, that the implementation of Social Conflict handling program implemented by the Ministry of Social Affairs with social harmony program in Moutong Sub-district has been running in accordance with the program plan. This is evidenced by the absence of conflicts that occurred within the last 4 (four) years, has established a harmonious relationship between the people of the village of Lobu and the village of East Moutong.

Keywords: Input, Activities, Output, Outcome, and Impact,

Indonesia adalah Negara majemuk, dalam artian bahwa masyarakatnya terdiri dari berbagai suku, agama, ras dan golongan. Perbedaan-perbedaan pandangan dan tujuan sering dipandang sebagai masalah yang hanya dapat di selesaikan jika kita semua memiliki maksud yang sama, atau ketika suatu pandangan lebih kuat dari pandangan lain. Sehingga dengan adanya perbedaan tersebut seringkali menimbulkan gesekan-gesekan sosial oleh adanya seluruh kepentingan masyarakat agar tetap berintegrasi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perjalanan hidup bangsa akan mengalami pemunduran apabila generasi muda yang berkonflik dibiarkan berlanjut. Maka hal itu bertentangan dengan asumsi yang biasa dikatakan oleh para generasi sebelumnya bahwa pemuda adalah pelopor perubahan dan sebagai generasi penerus yang akan memegang peranan yang urgen dalam setiap kehidupan masyarakat. Masalah konflik di Indonesia merupakan fenomena yang tidak asing lagi dan menyita perhatian publik karena wujudnya yang sebagian besar telah mengarah pada suatu

kekerasan sosial dan telah meluas pada berbagai lapisan masyarakat.

Pada umumnya konflik diakibatkan oleh perbedaan pendapat, pemikiran, ucapan, dan perbuatan. Sikap dasar yang sulit dan tidak ingin menerima dan menghargai perbedaan semacam itu akan mengubah seseorang berwatak suka berkonflik. Orang seperti ini akan membuat problem kecil dan sederhana sebagai alasan untuk menciptakan konflik. Konflik sebagai saluran akumulasi perasaan yang tersembunyi secara terus-menerus yang mendorong seseorang untuk berperilaku dan melakukan sesuatu berlawanan dengan orang lain. Sebuah keinginan ambisi yang kuat bahkan menyebabkan terjadinya konflik antar perorangan, sedangkan dorongan emosi yang kuat untuk menyalahkan orang lain akan menyebabkan seseorang terlibat konflik dengan orang lain.

Konflik dapat diartikan sebagai hubungan antar dua pihak atau lebih (individu maupun kelompok) yang memiliki atau merasa memiliki sasaran-sasaran yang tidak sejalan. (Mitchell, 1981).

Pengertian ini harus dibedakan dengan kekerasan, yaitu sesuatu yang meliputi tindakan, perkataan, sikap atau berbagai struktur dan sistem yang mengakibatkan kerusakan secara fisik, mental, sosial dan lingkungan dan atau menghalangi seseorang meraih potensinya secara penuh. (Fisher, et.al., 2001).

Mengevaluasi suatu program atau kebijakan saat ini yang berkaitan dengan penanggulangan masalah sosial merupakan sebuah langkah penting dalam proses analisis sebuah program atau kebijakan publik. Evaluasi membuahakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang ketidaksuaian antara kinerja kebijakan yang diharapkan dengan yang benar-benar dihasilkan.

Melakukan evaluasi dalam pelaksanaan program atau kebijakan memang harus dilaksanakan, agar para implementor kebijakan dapat mengetahui dan mengidentifikasi hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan program dan kebijakan. Sehingga apa yang menjadi sasaran dalam implementasi program atau kebijakan dapat tercapai. Maka dari itu evaluasi merupakan suatu langkah perbaikan terhadap segala proses yang sudah dilakukan dalam melaksanakan program atau kebijakan. Untuk itu evaluasi perlu dilakukan demi mengetahui tingkat keberhasilan dari pelaksanaan program atau kebijakan.

Suatu kebijakan diharapkan akan mencapai tujuan yang diharapkan dan pada akhirnya akan mengatasi permasalahan yang muncul dalam masyarakat. Sebagaimana alternatif program penangan konflik sosial yang terjadi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan di Wilayah Kanupaten Parigi Moutong.

Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka penanggulangan konflik baik dalam rangka pencegahan konflik, penghentian konflik maupun upaya pemulihan pasca konflik. Upaya

pemerintah ini kemudian dirumuskan dalam UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan konflik Sosial.

Pemerintah membangun sistem kelembagaan dalam upaya penanganan konflik sosial dalam ketentuan Undang-Undang tersebut dengan melibatkan semua komponen masyarakat untuk secara bersama-sama menyatukan visi dan misi untuk melakukan upaya penanggulangan konflik. Bahkan dalam konsep penanggulangan konflik tersebut, pemerintah mengakui eksistensi pranata adat dan pranata sosial yang ada, serta memberdayakan untuk melakukan langkah-langkah penanggulangan konflik bersama-sama pemerintah.

Seperti halnya konflik yang terjadi di Kabupaten Parigi Moutong, konflik antar kelompok sering kali terjadi dimana-mana. Konflik horizontal yang sering terjadi di Kabupaten Parigi Moutong umumnya bukan merupakan konflik antar etnis (suku), tetapi merupakan konflik akibat sentimen dan fanatik kedaerahan yang mayoritas melibatkan kalangan pemuda desa setempat.

Konflik ini pertama terjadi tahun 1972. pemicunya hanya persoalan sepele yaitu pertandingan sepak bola antara anak sekolah dasar, antara desa lobu yang mayoritas masyarakat asli dan desa Moutong Timur yang didiami oleh masyarakat gorontalo, bugis dan masayaratak asli. Konflik tahun 1972 ini bisa diredam melalui kerjasama antara pemerintah kabupaten Donggala dengan kecamatan Moutong dan tokoh masyarakat setempat, kepala desa, camat dan aparat kepolisian. Hasilnya dibuat kesepakatan bersama untuk tidak melakukan hal-hal yang menyebabkan terjadinya perkelahian (konflik).

Upaya pemerintah dan tokoh masyarakat ini cukup berhasil, hal ini diakrenakan tidak ada lagi konflik yang terjadi antara Desa Lobu dan Desa Moutong Timur dalam kurun waktu 1972 sampai dengan tahun 1997. nanti Tahun 1998

konflik yang melibatkan masyarakat kedua desa tersebut terjadi kembali. Setelah dilakukan penelusuran sebab terjadinya konflik, lagi-lagi hanya persolan sepele yaitu dendam lama tahun 1972 terulang kembali. Konflik ini terulang sampai dengan tahun 2001, dan puncaknya terjadi pada tahun 2014, konflik ini telah memakan korban baik materil maupun nyawa.

Korban jiwa yang meninggal dunia tercatat 4 (empat) orang dari desa Lobu dan 2 (dua) orang dari desa Moutong Timur . untuk kerugian harta benda tercatat 2 (dua) unit kendaran roda dua (motor) milik masyarakat desa lobu terbakar dan 1 (satu) unit rumah milik masyarakat desa Moutong Timur terbakar. Pada konflik sosial yang terjadi dikecamatan Moutong ini telah menjadi perhatian pemerintah daerah, terbukti telah banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam upaya pencegahan konflik sosial tersebut diantaranya melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan program: (1) Kegiatan sosialisasi dampak konflik yang melibatkan pemerintah kecamatan, Aparat kepolisian, aparat desa, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dari dua desa yang berkonflik, (2) program Pemberdayaan melalui kelompok Usaha bersama (kuba) yang melibatkan masyarakat kedua desa dengan menjalankan usaha bersama, (3) program keserasian sosial berbasis masyarakat, dengan jalankan membangun fasilitas umum, jalan umum yang menghubungkan kedua desa. Upaya yang dilakukan pemerintah diatas terus menerus dilakukan mengingat konflik sosial yang terjadi dikecamatan moutong ini sewaktu-waktu bisa terjadi lagi.

Berdasar pada berbagai permasalahan yang ditemukan dalam pelaksanaan Program Penanganan Konflik Sosial yang terjadi Di Kecamatan Moutong Timur. Hal ini yang kemudian melandasi peneliti untuk melakukan evaluasi program yang menggunakan alat analisis *Logical Framework Approach* / LFA dengan

pendekatan *Logic Model* menurut *W.K Kellogg Foundation* yang terdiri dari beberapa tahapan untuk mengukur berhasil atau tidaknya program yang telah dilaksanakan, juga untuk menilai capaian tertentu sebuah program atau kegiatan pembangunan. Sehingga penelitian ini mencoba melihat apakah program telah dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. *W.K Kellogg Foundation* (2004:1) menggambarkan komponen antara rencana kerja dan hasil yang diinginkan berdasarkan indikator/komponen. Komponen tersebut akan dijelaskan secara urut dari langkah 1 sampai 5. Komponen model kerangka logis dasar tersebut terdiri dari *Input, Activities, Output, Outcome, dan Impact* dari sebuah program, dan seberapa jauh capaian tersebut berkontribusi dalam menjelaskan perubahan yang terjadi. Pendekatan logika yang dimaksud dalam LFA ini adalah membangun hierarki kerangka logis yang berorientasi pada tujuan program tersebut. LFA adalah jenis khusus model logika atau pendekatan logika untuk membantu mengklarifikasi tujuan proyek/program, mengidentifikasi hubungan kausatif antara *input, activities, output, outcome dan impact*.

METODE

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Lokasi Penelitian

Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong

Informan

Informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 8 (delapan) orang

Sumber Data

Data Primer, Data Sekunder.

Teknik Pengumpulan Data

Pengamatan Awal Observasi), Wawancara (Interviu), Dokumentasi.

Teknik Analisis Datam

Reduksi Data (*data reduction*), Penyajian data (*data display*), Penarikan kesimpulan dan verifikasi

HASIL DAN PEMBAHASAN***Input (Keuangan, Sumber Daya Manusia)***

Input dari Program Penangan Konflik Sosial di Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong, dapat dilihat dari anggaran dana yang di salurkan oleh kementerian Sosial RI, dan pemerintah Daerah yaitu Dinas Sosial (DINSOS) Kabupaten Parigi Moutong selaku penyelenggara kegiatan, pada program penanganan Konflik Sosial bentuk *input* (masukan) dana (keuangan) bersumber dari Kementerian Sosial RI dan Dinas Sosial Kabupaten Parigi Moutong. Dana tersebut untuk pelaksanaan program antara lain Kelompok Usaha Bersama, Keserasian Sosial Berbasis Masyarakat, Sosialisasi kearifan Lokal, dan Pelatihan Keterampilan Otomotif. Dana tersebut disalurkan langsung ke Forum Keserasian Sosial (FKS) yang ada dimasing-masing Desa hal ini diungkapkan oleh Bapak Ishak H. S.S., M.Si selaku Pj. Kabid LINJAMSOS (Perlindungan Jaminan Sosial) yang menyatakan bahwa:

“Dana yang diberikan oleh kementerian Sosial dan Dinas Sosial Kabupaten Parigi Moutong berjumlah Rp. 4.720.300.000 M, dana tersebut untuk membiayai program Kelompok Usaha Bersama, Keserasian Sosial Berbasis Masyarakat, Sosialisasi kearifan Lokal, dan Pelatihan Keterampilan Otomotif.” (Tanggal 02-05-2017).

Kementerian Sosial Melalui Dirjen Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial (PSKBS) Republik Indonesia. kepada masyarakat yang dikelola oleh Forum Keserasian Sosial di desa dicairkan

sekaligus melalui Rekening Panitia Forum Keserasian Sosial. Untuk pencairan ditingkat Forum, terlebih dahulu meminta rekomendasi ke Dinas Sosial Kabupaten Parigi Moutong.

Activities (Proses Aktifitas)

Proses Pelaksanaan Program Penangan Konflik Sosial Di Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku yaitu Program pemberdayaan masyarakat,. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Ishak H. S.S., M.Si selaku Pj. Kabid LINJAMSOS (Perlindungan Jaminan Sosial) yang menyatakan bahwa:

“Ya, dalam pelaksanaan program Penanganan Konflik kita juga program Pemberdayaan Masyarakat seperti Forum Keserasian Sosial (FKS) yaitu dengan membentuk tim khusus yang menangani jumlah alokasi serta proses pelaksanaan Penanganan Konflik agar masyarakat berkontribusi langsung dalam proses pembangunan. Selain itu kita juga memfasilitasi masyarakat dalam Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Program Keluarga Harapan (PKH) (Tanggal 15-05-2017).

Selain dalam bentuk Pemberdayaan Masyarakat Desa, aktifitas yang dilakukan dalam pelaksanaan program Penangan Konflik Sosial juga dilakukan dalam bentuk penyediaan infrastruktur dasar di Desa yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Output (Produk barang/jasa)

Output dari Program Penangan Konflik Sosial di Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong dapat dilihat dari, jalan yang menghubungkan kedua Desa, Fasilitas Olah Raga, Tugu Keserasian Sosial, Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Hal ini diungkapkan oleh Ibu Abdun Aser Daepatola, selaku Camat Moutong yang menyatakan bahwa:

“hasi dari program ini adalah berupa jalan yang menghubungkan kedua Desa, Fasilitas Olah Raga, Tugu Keserasian Sosial,

Kelompok Usaha Bersama (KUBE).”(Tanggal 20-05-2017).

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Ishak H. S.S., M.Si selaku Pj. Kabid LINJAMSOS (Perlindungan Jaminan Sosial) yang menyatakan bahwa:

“bentuk kegiatan yang kita lakukan dalam rangka penanganan Konflik Sosial adalah dengan melakukan sosialisasi dampak konflik, membentuk kelompok usaha bersama, sampai pada pembuatan tugas keserasian sosial. Kegiatan ini melibatkan pihak kecamatan, kepolisian, dan TNI.”(Tanggal 20-05-2017).

Hasil wawancara juga diungkapkan oleh Bapak Pian Hemoto satu Tokoh Masyarakat di Desa Lobu Kecamatan Moutong. Yang mengatakan bahwa:

“Ya, pada saat pelaksanaan Program penanganan Konflik Sosial yang dilakukan itu beragam sesuai dengan kebutuhan masyarakat. melakukan sosialisasi dampak konflik, membentuk kelompok usaha bersama, sampai pada pembuatan tugas keserasian sosial. Kegiatan ini melibatkan pihak kecamatan, kepolisian, dan TNI.”(Tanggal 20-05-2017).

Infrastruktur yang dibangun pada saat pelaksanaan Program Penanganan Konflik Sosial disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang ada berdasarkan item yang sudah disepakati bersama pada saat musyawarah.

Outcome (menengah)

Outcome dari Program Penanganan Konflik Sosial di Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong dapat dilihat dari indikator keberhasilan berdasarkan petunjuk pelaksanaan Program Penanganan Konflik Sosial. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Ishak H. S.S., M.Si selaku Pj. Kabid LINJAMSOS (Perlindungan Jaminan Sosial Kabupaten Parigi Moutong yang menyatakan bahwa:

“Ya karena memang tujuan kita pada saat pelaksanaan Program Penanganan Konflik Sosial ini adalah Terjalannya hubungan yang

baik antara kedua desa, melalui Kelompok usaha bersama (KUBE). Akses jalan setempat produksi menjadi mudah”. (Tanggal 25-05-2017).

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Abdun Aser Daepatola S.Sos, selaku Camat Moutong. Yang mengatakan bahwa:

“Tujuan sebenarnya dari Program Penanganan Konflik Sosial ini yaitu Terjalannya hubungan yang baik antara kedua desa, melalui Kelompok usaha bersama (KUBE).Akses jalan setempat produksi menjadi mudah, ini tidak hanya terbatas pada aspek pembangunan infrastruktur saja tapi juga seluruh bidang aspek yang ada”.(Tanggal 25-05-2017).

impact (dampak jangka panjang)

Impact yang dirasakan oleh masyarakat setelah adanya Program Penanganan Konflik Sosial di Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong dapat dilihat dari pernyataan Bapak Pian Hemoto salah satu Tokoh Masyarakat di Desa Lobu Kecamatan Moutong yang mengatakan bahwa:

“Alhamdulillah setelah adanya Program Penanganan Konflik Sosial Tidak ada lagi kesenjangan antara masyarakat asli dengan masyarakat pendatang, Terjalannya hubungan yang baik dari kedua desa.”. (Tanggal 26-05-2017).

Hasil wawancara juga diungkapkan oleh Bapak Jufrin Muslin selaku Kepala Desa Moutong Timur Kecamatan Moutong yang mengatakan bahwa:

“Dampaknya sangat bermanfaat bagi masyarakat ini dapat dilihat dari pembangunan infrastruktur yang dilakukan. Seperti pembukaan jalan yang dilakukan Dari desa Lobu Ke Desa Moutong Timur yang keadaan akses jalannya sangat sulit namun setelah dilakukan pembukaan jalan akhirnya akses kesana sekarang cukup memadai dan sangat membantu masyarakat khususnya masyarakat yang berprofesi sebagai petani”. (Tanggal 06-05-2017).

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan serta data dan informasi dari responden dapat diambil kesimpulan sebagai berikut Evaluasi kebijakan penanganan Konflik Sosial di Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong sudah berjalan dengan baik, sesuai dengan yang di harapkan.

Rekomendasi

Perlu ada program tindak lanjut dari pelaksanaan program Penanganan Konflik Sosial di Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong, terutama dalam hal pemberdayaan masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan penuh keiklasan hati penulis mengucapkan terimah kasih kepada Bapak Dr. Moh. Irfan Mufti, M.Si dan Ibu Dr. Intam Kurnia, M.Si, yang telah begitu banyak memeberikan masukan dan bimbingan kepada penulis, sejak awal pembimbingan sampai penyusunan artikel ini untuk layak dipublikasikan.

DAFTAR RUJUKAN

- W.K. Kellogg Foundation. 2004 *Logic Model Development Guide*.
Logical Framework Approach Handbook for objectives-oriented planning. 1999.